

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus manipulasi laporan keuangan selama bertahun-tahun, akhirnya terungkap pada salah satu perusahaan yang termasuk dalam medcom.id ialah Jiwasraya. Pada Minggu 29 Desember 2019 Jiwasraya aneh dari tahun ke tahun mengalami krisis likuiditas, dia mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dedy mengatakan bahwa kantor akuntan publik (KAP) yang telah mengaudit laporan keuangan Jiwasraya juga perlu diselidiki. Bahkan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan laporan keuangan Jiwasraya ditolak pada tahun 2006 dan 2007. Kami hanya meminta akuntan publik *PricewaterhouseCoopers* Indonesia untuk melakukan audit pada direksi saat ini, dan kejadian tersebut terungkap pada tahun 2006-2009.

Kasus ini berawal dari laporan masyarakat dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yang mengendus dugaan korupsi sejak 2014 hingga 2018. Jiwasraya menjual produk tabungan JS dengan suku bunga tinggi 6,5% hingga 10% melalui unit kerja pusat bancassurance dan aliansi strategis, sehingga memperoleh total pendapatan Rp. 53,27 triliun dari premi asuransi. Per Agustus 2019, potensi kerugian nasional Jiwasraya mencapai Rp. 13,7 triliun. Dapat dilihat bahwa fenomena yang terjadi pada perusahaan tersebut, ialah kurangnya keterbukaan informasi perusahaan terkait aktivitas perusahaan dan sistem manajemen perusahaan yang lemah. Ancaman kegagalan perusahaan ini telah memaksa komite dan organisasi tata kelola perusahaan di seluruh dunia, untuk memberikan

informasi dalam jumlah besar laporan dan merumuskan aturan yang membantu memantau dan mengawasi sistem manajemen perusahaan (Al-Janadi *et al.*, 2013). Oleh karena itu, salah satu cara mengatasi ancaman kegagalan dan kebangkrutan adalah dengan memberikan informasi tambahan yang memadai.

Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan pengungkapan wajib yang melebihi pengungkapan (Nugraheni, 2012). Manajemen selalu bergerak untuk menyampaikan informasi perusahaan yang menurutnya sangat menarik bagi investor dan pihak eksternal lainnya. Menurut para pemangku kepentingan khususnya investor ialah *information* yang diungkapkan oleh pengelolaan di suatu perusahaan, dapat digunakan alat untuk menganalisis & memantau performa tata kelola perusahaan. Penelitian tentang faktor-faktor yang dipengaruhi oleh pengungkapan sukarela sudah banyak digunakan dan menunjukkan hasil yang belum konsisten. Faktor yang pertama adalah kepemilikan publik yang diteliti oleh Agustin & Oktavianna (2019), faktor yang kedua adalah dewan komisaris yang diteliti oleh Nanda & Nahumury (2018), faktor yang ketiga adalah komisaris independen yang diteliti oleh Gunawan (2019), faktor yang keempat adalah komite audit yang diteliti oleh Suwasono (2019), Poluan & Nugroho (2015).

Menurut Cadbury dalam buku Lukviarman (2016) yaitu *Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan berfokus pada tujuan keseimbangan ekonomi & sosial dengan tujuan pribadi & kelompok. Perusahaan memiliki tugas yang utama yaitu ingin mencapai efisiensi dalam penggunaan

sumber daya dan menggunakan sistem akuntabilitas secara merata, ketika menggunakan sumber daya tersebut. Hal ini untuk menyeimbangkan kepentingan individu, perusahaan dan masyarakat (Sugiyono, 2016). Selain itu tata kelola perusahaan dapat meminimalkan biaya yang ditanggung oleh pemilik dan pemegang saham, ketika manajemen perusahaan membeli perusahaan lain untuk memperluas kekuasaannya, maka dapat meminimalkan biaya perusahaan untuk memperoleh dana, serta nilai saham perusahaan meningkat terutama berinvestasi.

Adanya pengungkapan sukarela, informasi yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan akan jauh lebih terbuka. Manajemen perusahaan melalui *Corporate Governance* mampu mengelola perusahaan, sehingga apa yang menjadi hak kepemilikan publik, susunan struktur organisasi, penugasan serta mempunyai tanggung jawab diantara dewan komisaris, komisaris independen komite audit akan jauh lebih terintegrasi. *Corporate Governance* juga menyediakan struktur melalui tujuan perusahaan, untuk mencapai pemantauan kinerja perusahaan yang bagus.

Public Ownership ialah jumlah petunjuk kepemilikan nilai *public*. Menurut Nugraheni (2012), rasio kepemilikan saham publik mengacu pada perbandingan antara jumlah kepemilikan saham milik publik dengan yang dimiliki oleh perusahaan. Pengungkapan di sini mengacu pada pihak selain manajemen dan tidak memiliki hubungan khusus dengan perusahaan. Kepemilikan publik saham berarti publik ikut memiliki perusahaan. Semakin banyak saham yang dijual ke publik, maka semakin banyak pula saham perusahaan yang beredar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan

semakin perlu memperluas cakupan pengungkapan informasi sukarela. Pemegang saham membutuhkan informasi perusahaan yang lebih lengkap untuk memantau kegiatan manajemen, sehingga dapat mewujudkan kepentingannya terhadap perusahaan.

Dewan Komisaris ialah salah satu organ di suatu perusahaan yang memiliki tanggung jawab bersama untuk mengawasi, memberikan saran kepada direksi dan menentukan perusahaan tersebut menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Rifai, 2009). Jumlah anggota dewan komisaris yang besar, maka dapat semakin efektif untuk memantau penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam bentuk transparansi informasi, sehingga mendorong manajemen untuk meningkatkan tingkat pengungkapan sukarela.

Menurut Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyebutkan bahwa *Independent Commissioner* ialah anggota Dewan Komisaris yang hubungannya dengan perusahaan, dapat mempengaruhi kemampuan orang tersebut untuk bertindak secara independen. Komisaris independen memiliki akses tertinggi terhadap informasi tentang perusahaan. Hal ini karena dewan komisaris independen tidak ikut serta dalam kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi perlu dilakukan untuk mengurangi asimetri informasi dan menyampaikan informasi secara lebih proaktif.

Komite audit adalah komite yang mempunyai fungsi yaitu melakukan tugas pemeriksaan dan pengawasan terhadap operasi dan manajemen perusahaan.

Peran komite audit juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan obyektifitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan akan adanya pengendalian internal yang lebih baik (Wijayani *et al.*, 2019). Keberadaan komite audit sebagai pengawas pengelolaan keuangan mendorong perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan yang lebih baik, sehingga meningkatkan derajat pengungkapan sukarela, oleh karena itu keberadaan komite audit dapat mendorong perusahaan untuk memperluas cakupan pengungkapan sukarela.

Pentingnya pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan, dapat membantu investor melihat nilai tambah dan transparansi perusahaan ketika mengungkapkan hal-hal selain pengungkapan wajib. Perusahaan dengan transparan yang kurang akan mengakibatkan terjadinya *information asymmetry* antara manajer menjadi agen dan pemilik sebagai pemegang saham/investor. Di hadapan pemangku kepentingan, perusahaan akan secara sukarela mengungkapkan informasinya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dijalankan oleh Fatmawati *et al.*, (2018) yang menemukan bahwa kepemilikan publik berdampak positif terhadap luas pengungkapan sukarela. Namun penelitian lain tidak sependapat dengan hasil tersebut, Wardani (2012) mengungkapkan kepemilikan publik tidak berdampak terhadap luas pengungkapan sukarela. Tetapi penelitian lain tidak sependapat dengan hasil tersebut, Poluan & Nugroho (2015) yang menyatakan bahwa komite audit berdampak negatif terhadap luas pengungkapan sukarela.

Penelitian ini mengembangkan pada penelitian sebelumnya yakni Fatmawati *et al.*, (2018) yang melakukan penelitian mengenai peran *corporate governance* dalam meningkatkan *voluntary disclosure*. Penelitian Fatmawati *et al.*, (2018) menggunakan data *annual report*, perusahaan sektor pertambangan yang termasuk di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2016. Perbedaan penelitian ini melalui penelitian sebelumnya adalah periode penelitian yang dilakukan, karena dengan menggunakan periode terbaru dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan menambahkan satu variabel kontrol berupa profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Prastiwi (2014) mengemukakan bahwa, semakin profitabilitas yang tinggi di suatu perusahaan maka semakin informasi yang diungkapkan lebih mayoritas dengan membandingkan perusahaan yang profitabilitas rendah. Namun jika dilihat dari profitabilitas yang dari kualitas investasi, maka perusahaan dengan keuntungan lebih rendah juga terpacu untuk menyatakan informasi secara lebih luas serta dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan pendapat pasar kurang baik terhadap kualitas investasi. Penelitian ini menambahkan variabel kontrol berupa profitabilitas, yang berfungsi sebagai mengukur suatu keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu, sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan usaha perusahaan melalui pengungkapan laporan tahunan maupun sebaliknya. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah menguji variabel kepemilikan publik, dewan komisaris, komisaris independen & komite audit, sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela.

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019)”**.

1.2 **Rumusan Masalah**

Dengan adanya uraian latar belakang yang sudah dianalisis, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan publik terhadap luas pengungkapan sukarela?
2. Bagaimana pengaruh dewan komisaris terhadap luas pengungkapan sukarela?
3. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap luas pengungkapan sukarela?
4. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap luas pengungkapan sukarela?

1.3 **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini ialah :

1. Untuk menguji & menganalisis pengaruh kepemilikan publik terhadap luas pengungkapan sukarela
2. Untuk menguji & menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap luas pengungkapan sukarela
3. Untuk menguji & menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap luas pengungkapan sukarela
4. Untuk menguji & menganalisis pengaruh komite audit terhadap luas pengungkapan sukarela

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat mengedepankan referensi pada pengembangan teori tentang dampak *corporate governance* terhadap luas pengungkapan sukarela yang dikontrol oleh ukuran perusahaan dan profitabilitas, dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dibidang pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai wacana bahan evaluasi ke depan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai pengungkapan laporan keuangan.

b. Bagi perusahaan

Diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk membantu meningkatkan luas pengungkapan sukarela agar bermanfaat sebagai bahan pertimbangan emiten untuk pengambilan keputusan investasi.